

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara memiliki beberapa tujuan termasuk Indonesia, yang mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. Salah satu ukuran dari pertumbuhan ekonomi ialah pendapatan nasional. Pendapatan nasional dari suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan nasional merupakan ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono, 1999).

Produk Domestik Bruto (PDB) pada umumnya digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah negara dan merupakan sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa definisi PDB, namun pada intinya PDB merupakan nilai moneter dari seluruh produksi barang jadi yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Adapun PDB biasanya dihitung dalam periode tahunan (Investopedia, 2012).

Pembangunan ekonomi daerah ialah bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Ini berarti pembangunan ekonomi daerah nantinya diharapkan mampu menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh (Sibero, 1985).

Menyimak evolusi pergeseran makna pembangunan (Kuncoro, 2010 ; 2011), agaknya jelas bahwa dalam penyusunan fundamental ekonomi diperlukan identifikasi sasaran penyusunan fundamental ekonomi daerah. Penyusunan indikator fundamental ekonomi daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditegaskan apa sasaran yang hendak dicapai oleh suatu daerah.

Fundamental ekonomi daerah pada hakekatnya merupakan indikator yang mencerminkan kondisi riil ekonomi daerah, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, pengangguran, ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index = HDI).

Provinsi Jawa Tengah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Provinsi Jawa Tengah berperan dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan ekonomi, lalu pertumbuhan ekonomi dihitung melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Pulau di Jawa yang

terdiri dari 35 Kabupaten / Kota dan memiliki latar belakang wilayah yang berbeda. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap provinsi. Perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi.

Penerapan otonomi daerah mulai tahun 2004 sampai sekarang pada dasarnya bertujuan untuk mengefisienkan semua kebijakan yang berkaitan dengan urusan daerah, dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masing-masing daerah, sehingga mampu untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah provinsi tersebut termasuk sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan pengamatan dari satu region provinsi, Jawa Tengah dikatakan mempunyai PDRB yang baik, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, ketika dibandingkan dalam satu region yang lebih besar, yakni Pulau Jawa, yang mana Provinsi Jawa Tengah termasuk didalamnya, Pertumbuhan PDRB terendah ketiga

setelah pertumbuhan PDRB D.I Yogyakarta dan Banten. Berikut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015
(Milliar Rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	1.147.558	1.222.528	1.296.695	1.373.390	1.454.102
Jawa Barat	965622	1.028.410	1.093.544	1.149.231	1.207.001
Jawa Tengah	656268	691343	726655	764993	806609
Yogyakarta	68050	71702	75627	79532	83462
Jawa Timur	1.054.402	1.124.465	1.192.790	1.262.697	1.331.418
Banten	290546	310386	331099	349206	367959

Sumber : BPS (berbagai terbitan)

Dalam Tabel 1.1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai nilai PDRB yang relatif rendah. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah selalu berada pada posisi di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan lebih rendah juga dari Provinsi Jawa Barat, walaupun Provinsi Jawa Barat sendiri telah dimekarkan menjadi Provinsi Banten serta Provinsi Jawa Barat. Tabel 1.1. juga menjelaskan bahwa pada tiap tahunnya PDRB Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan, akan tetapi masih kalah dibanding dengan Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Timur. PDRB Jawa Tengah ini cukup signifikan tertinggalnya yakni hampir dua kali lipat dari PDRB Jawa Timur dan Jawa Barat. Akan tetapi untuk DI Yogyakarta serta Banten, nilai PDRBnya masih kalah dibandingkan dengan PDRB Jawa Tengah.

Dalam penelitian Rustiono (2008) menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, faktor-faktor tersebut ialah investasi, tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, rendahnya PDRB Provinsi Jawa Tengah ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Tabel 1.2.
Komposisi Penerimaan Daerah Jawa Tengah Tahun 2012-2015
(Ribu Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Jumlah
2012	6.629.308.010	2.318.806.100	8.948.114.110
2013	8.212.800.640	2.467.814.629	10.680.615.269
2014	9.916.358.232	2.542.626.745	12.458.984.977
2015	11.696.822.243	2.694.385.621	14.391.207.864

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2016, BPS

Dalam Tabel 1.2. dapat dilihat komposisi serta proporsi Pendapatan Asli Daerah yang telah digali oleh pemerintah daerah Jawa Tengah telah mengalami peningkatan, baik jumlah ataupun proporsi pendapatan dari subsidi terus mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 PAD Jawa Tengah sebesar Rp 8.948.114.110 (ribu rupiah) dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2015 mencapai Rp 14.391.207.864 (ribu rupiah). Hal ini mengandung arti bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah Jawa Tengah melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Peningkatan PAD ini diharapkan mampu menjadi sinyal untuk kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1.3.
Perkembangan Investasi Swasta di Jawa Tengah (Juta Rupiah)

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi (Juta Rupiah)
2011	24	775.828,58	35	1.347.740,28
2012	18	1.633.952,39	31	954.861,18
2013	46	859.088	40	278.014
2014	20	3.142.280	58	3.788.598
2015	50	7.369.688	74	1.466.839

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2012-2016 dan BPMD Provinsi Jawa Tengah

Dalam Tabel 1.3. tersebut terlihat bahwa nilai investasi di Jawa Tengah sangatlah fluktuatif, pada tahun 2011 dari 24 proyek penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh investor dalam negeri tersebut bernilai Rp 775.828,58 (juta rupiah), sedangkan pada penanaman modal asing nilainya cukup fantastis yakni mencapai Rp 1.347.740,28 (juta rupiah) dengan total proyeknya mencapai 35 buah proyek. Kemudian pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah proyek yang cukup signifikan yakni pada penanaman modal dalam negeri totalnya hanya mencapai 18 buah proyek, akan tetapi nilai modal yang ditanamkan oleh investor mengalami kenaikan yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 1.633.952,39 (juta rupiah), begitu pula untuk penanaman modal asing, jumlah proyek yang ditanamkan mengalami penurunan yakni hanya berjumlah 31 proyek dan ini diiringi dengan penurunan nilai proyek yang hanya mencapai Rp 954.861,18 (juta rupiah). Untuk tahun 2013, terjadi penurunan nilai proyek yang sangat drastis dari tahun sebelumnya yakni tahun 2012 baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, akan tetapi untuk jumlah proyeknya mengalami kenaikan yang cukup drastis yakni untuk PMDN mencapai 46 buah proyek dengan nilai investasi yang mengalami penurunan sangat drastis yakni hanya sebesar Rp 859.088 (juta rupiah), kemudian untuk PMA mencapai 40 buah proyek dengan nilai proyeknya sebesar Rp 278.014 (juta rupiah). Pada tahun 2014 jumlah proyek PMDN mengalami penurunan cukup drastis yakni menjadi 20 buah proyek, namun nilai proyeknya mengalami kenaikan sangat drastis yakni mencapai Rp 3.142.280 (juta rupiah), sedangkan untuk jumlah proyek PMA pada tahun ini mengalami kenaikan yakni menjadi 58 buah proyek dengan nilai proyek yang cukup fantastis yakni sebesar Rp 3.788.598 (juta rupiah). Untuk tahun 2015, jumlah proyek PMDN mengalami kenaikan yang fantastis, yakni 2,5 kali lipatnya menjadi 50 buah proyek dengan nilai proyek yang mengalami kenaikan 2 kali lipatnya yakni mencapai Rp 7.369.688 (juta rupiah), sedangkan untuk jumlah PMA

mengalami kenaikan pula menjadi 74 buah proyek, namun nilai proyeknya justru mengalami penurunan yakni menjadi Rp 1.466.839 (juta rupiah).

Dalam merealisasikan pembangunan daerah maka dibutuhkan suatu modal pembangunan yang tak kalah pentingnya dengan keuangan daerah serta investasi, yakni sumber daya manusia. Peran serta dari keseluruhan masyarakat akan membuat pembangunan daerah terealisasi dengan cepat, ini dikarenakan rasa nasionalisme yang lebih besar terhadap daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka dibutuhkan SDM yang berkualitas.

Tabel 1.4.
Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Bekerja (jiwa)
2010	15.809.447
2011	15.916.135
2012	16.132.890
2013	15.964.048
2014	16.550.682
2015	16.435.142

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka

Dalam pembangunan daerah, tentunya akan ada harapan untuk bisa membuka lapangan kerja baru sesuai kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal dengan tujuan kepentingan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Tabel 1.4. dapat terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja selama kurun waktu 6 tahun cenderung fluktuatif, ada penurunan jumlah tenaga kerja di tahun 2015 dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2015 jumlah pekerja sebesar 16.435.142 jiwa. Pada tahun 2014 sendiri terdapat jumlah pekerja yang mencapai 16.550.682 jiwa, jumlah ini terbesar merupakan jumlah terbesar selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Tahun 2013 juga mengalami penurunan jumlah pekerja dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2013

jumlah pekerja sebesar 15.964.048 jiwa, jumlah tersebut turun dari tahun 2012 yang mencapai 16.132.890 jiwa pekerja. Fenomena penurunan jumlah pekerja ini terjadi setiap tahun hingga tahun 2010 yang mana jumlah pekerjanya sebesar 15.809.447 jiwa.

Selain variabel diatas, ada beberapa indikator ekonomi makro lain yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, seperti tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek. (Basuki dan Prawoto, 2014).

Tabel 1.5.
Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015
(Persen)

Tahun	Inflasi
2010	6,88
2011	2,68
2012	4,24
2013	7,99
2014	8,22
2015	2,73

Sumber: BPS 2016

Pada Tabel 1.5. diatas terlihat bahwa tingkat Inflasi di Jawa Tengah setiap tahunnya sangatlah fluktuatif. Dilihat dari tahun 2010 tingkat Inflasi di Jawa Tengah sebesar 6,88% (yoy), kemudian di tahun 2011 turun begitu drastis menjadi 2,68% (yoy), lalu di tahun 2012 tingkat inflasi mengalami kenaikan yakni pada tingkat 4,24% (yoy) dan hal ini terus berlanjut pada tahun 2013 yang juga tingkat inflasi mengalami kenaikan yakni menjadi 7,99% (yoy). Pada tahun 2014 tingkat Inflasi di Jawa Tengah cenderung naik dari tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 8,22% (yoy), kemudian pada tahun 2015 tingkat Inflasi justru cenderung turun drastis yakni menjadi sebesar 2,73% (yoy).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam dalam meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh sebab

itu, pemerintah daerah serta DPRD harus mampu mengupayakan secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang realitanya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam melihat apakah suatu daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah salah satunya yakni dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu untuk menutup anggaran belanja daerah suatu daerah. Selain itu, anggaran belanja pembangunan yang telah dialokasikan untuk proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal 1986 dalam Larasati 2015).

Agar dapat tercipta ekonomi yang berkembang di Jawa Tengah maka pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada guna pembangunan ekonomi, hal ini bertujuan untuk menggerakkan serta memajukan pemasukan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki kewajiban untuk menggunakan dana sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan semaksimal serta seefisien mungkin. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Tabel 1.6.
Realisasi Belanja Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2010-2014
(Rupiah)

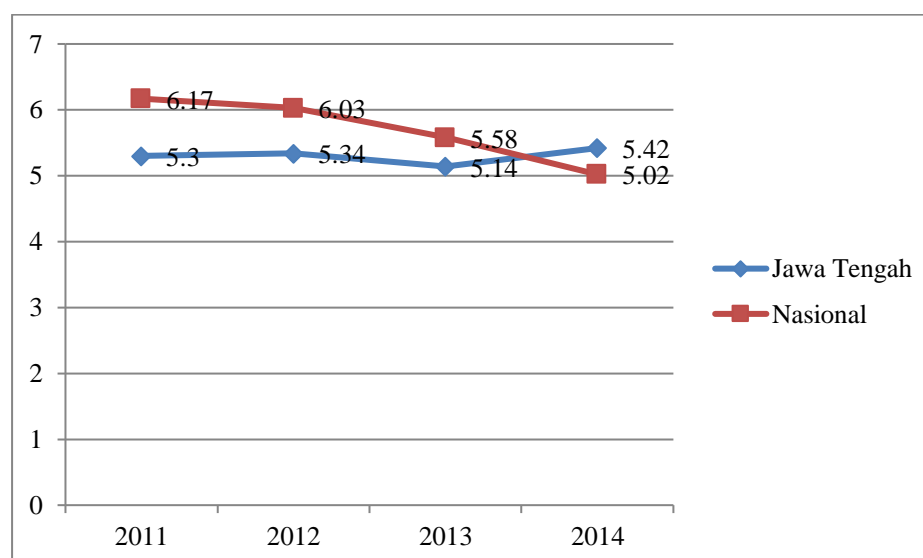
Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Jumlah
2012	2.588.797.623	8.858.046.481	11.446.844.104
2013	3.511.079.685	9.213.696.623	12.724.776.308
2014	3.968.365.249	11.117.699.785	15.086.065.034
2015	5.672.337.400	11.665.348.934	17.337.686.334

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2016, BPS

Dari Tabel 1.6. diatas dapat terlihat bahwa realisasi belanja daerah untuk Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2012, realisasi belanjanya sebesar Rp 11.446.844.104, kemudian naik di tahun 2013 menjadi sebesar Rp 12.724.776.308, pada tahun 2014 sebesar Rp 15.086.065.034, dan di tahun 2015 naik lagi menjadi sebesar Rp 17.337.686.334.

Pertumbuhan ekonomi memiliki arti kegiatan pembangunan dalam perekonomian yang mana menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah serta tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat (Asion, 2009 dalam Afrizal 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan berbagai faktor pendukung seperti penggalan sumber PAD secara maksimal, investasi, angkatan kerja yang mumpuni, pengendalian tingkat inflasi serta belanja pemerintah yang tercantum pada APBD dapat terserap dengan baik dalam pembangunan, dengan hal ini maka akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014 (Persen)



Sumber : BPS

Dari Grafik 1.1. dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif, akan tetapi dapat disimpulkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 pertumbuhan ekonominya sebesar 5,3% kemudian naik pada tahun 2012 menjadi 5,34%, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 5,14% pada tahun 2013 dan kemudian naik cukup signifikan menjadi 5,42% pada tahun 2014, angka tersebut bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan pencapaian yang baik, apabila terus dikembangkan ekonomi daerah khususnya Jawa Tengah maka dapat membantu kenaikan perekonomian nasional. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin menurun tiap tahun.

Dalam usaha penggalian potensi pendapatan daerah, maka peningkatan peran swasta serta peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal dalam pembangunan daerah diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) haruslah dilakukan agar pembangunan yang diharapkan daerah berjalan sesuai potensi yang ada serta kesinambungan dalam pembangunan dapat tercapai dan terealisasi dengan baik.

Dari latar belakang dan gambaran tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB, melalui penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah Periode 1985-2015”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada :

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh PDRB di Jawa Tengah
2. Data yang digunakan ialah data tahunan yang berawal dari tahun 1984 sampai 2015 di Jawa Tengah, yakni :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Investasi
- d. Tenaga Kerja
- e. Inflasi
- f. Belanja Daerah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh variabel PAD terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
2. Seberapa besar pengaruh variabel Investasi terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
3. Seberapa besar pengaruh variabel Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
4. Seberapa besar pengaruh variabel Inflasi terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
5. Seberapa besar pengaruh variabel Belanja Daerah terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 1985-2015

D. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah, bertujuan untuk :

1. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel PAD terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015

2. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel Investasi terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
3. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
4. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel Inflasi terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
5. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel Belanja Daerah terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan yang bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan serta pengetahuan yang telah didapatkan selama berada di bangku kuliah. Dalam penelitian ini peneliti menambah wawasannya dalam kaitannya pengaruh PAD, Investasi serta Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah dari tahun 1985-2015.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat digunakan sebagai saran atau masukan dalam permasalahan yang terkait. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang Ilmu Ekonomi di Indonesia.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi oleh pihak yang membutuhkan, utamanya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.